

Pembangunan Berkelanjutan Melalui SDGs

Agroforestri tidak sekadar meningkatkan ekonomi. **Irine Wardhanie**

Millennium Development Goals (MDGs) akan berakhir di penghujung 2015. Agenda selanjutnya yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memiliki 17 agenda pencapaian hingga tahun 2030. Seluruh agenda pencapaian SDGs ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Karena perancangan RPJMN berbarengan dengan perumusan SDGs.

“Jadi tidak seperti MDGs kemarin yang baru masuk, RPJMN sudah selesai dibahas,” ujar Medrilzam, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan Bappenas.

Medrilzam juga menjelaskan bahwa peran partisipatif masyarakat dan komponen swasta sangat dibutuhkan.

Menurut Meine Van Noordwijk, Chief Science Advisor ICRAF, lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang riset agroforestri, SDGs sangat penting bagi semua negara, karena bisa jadi payung negosiasi dalam proses kerja sama di setiap lini. Poin

penting dari SDGs, menurut Meine, adalah komitmen bersama dari semua pihak dalam proses pembangunan berkelanjutan. Ini sesuai dengan prinsip SDGs yaitu *no one left behind*, yang berarti semua elemen masyarakat harus terlibat dalam proses pelaksanaan setiap agenda untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Untuk itu, para peneliti harus merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam satu konsep: pemanfaatan lahan dalam konteks lokal yang berakar pada pemahaman masalah dan solusinya.

“Hal itu bisa dicapai melalui pengembangan pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal,” ujarnya.

SDGs mempunyai tantangan besar, yakni menciptakan pembangunan berkelanjutan yang “hijau”. Hasil penelitian ICRAF menunjukkan bahwa sistem agroforestri bisa menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan itu.

Bukti kesuksesan agroforestri ini bisa dilihat di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Di sana, para petani diajarkan untuk mengombinasikan tanaman, juga

diajarkan proses panen dan pasca panen yang lebih baik. Hal itu bisa membantu harga jual jadi lebih tinggi.

Saat ini Indonesia sedang berusaha keras untuk mencapai kedaulatan pangan, yang merupakan bagian dari nawacita Presiden Joko Widodo. Tantangan besarnya adalah ketersediaan lahan pertanian yang semakin menyusut. Namun kekurangan itu tidak harus diselesaikan dengan pembukaan lahan baru.

Para peneliti justru lebih menyarankan diversifikasi tanaman pangan. Selain tidak harus membuka lahan baru, diversifikasi pangan pasti sesuai dengan unsur-unsur masyarakat lokal serta lebih masuk akal untuk mencapai ketahanan pangan.

Abdon Naban, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan bahwa agroforestri di Indonesia bukanlah hal yang baru. Melainkan bagian dari pengelolaan adat, yang justru saat ini sedang terancam. “Saya menantang ICRAF, bagaimana para peneliti membantu mencegah kepunahan agroforestri,” ujarnya. Menurut Abdon, pembangunan agroforestri yang mengabaikan sistem agroforestri yang sudah ada di dalam masyarakat adat, tidak akan berdampak apapun.

Lebih lanjut Abdon menjelaskan bahwa agroforestri yang dimiliki masyarakat adat adalah cara utama masyarakat adat menghasilkan makanan, menjaga air, mendapatkan obat-obatan. Sistem ini sedang terancam, dengan adanya sistem monokultur yang membuat mereka bergantung pada perusahaan.

Agroforestri bukan melulu masalah ekonomi, tapi juga perihal hajat hidup. Jika agroforestri hilang maka hidup pun hilang. Hal ini terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Contohnya di Papua dengan program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Masyarakat di Papua yang sudah melakukan sistem agroforestri untuk tanaman sagu, dipaksa untuk menanam tanaman yang tak pernah ada dalam adat mereka. Mulai dari tebu hingga sawit.

Langkah paling riil yang harus diambil oleh pemerintah adalah selamatkan wilayah adat, karena agroforestri adalah bagian kecil dari masyarakat adat yang memiliki lokalitas yang jauh lebih besar. ■



KORBAN. Masyarakat adat di Papua dipaksa menanam tebu hingga sawit.